

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KAMPUNG DOBUT OLEH SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI PAPUA BARAT

Florentia Chefique Suyenn Tigauw
NPP 29.1879

*Asal Pendaftaran Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: florentiasuyenn07@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Dobut Village is one of the villages located in the South Manokwari District, Manokwari Regency, West Papua province which has a fairly large number of uninhabitable houses. The large number of Uninhabitable Houses in Dobut Village shows that there are still gaps in meeting housing needs (backlog). With the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) provided by the government it is hoped that houses will be habitable, proving the seriousness of the government in building/improving the quality of houses for low-income people (MBR). The central government through the Ministry of Public Works and Public Housing issued a policy Number 07 of 2018 concerning Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS). The implementation of the program has obstacles and obstacles both in the government and the community itself. **Purpose:** This study aims to analyze how the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) policy, the influencing factors, and analyze the efforts that must be made to overcome the inhibiting factors of the program policy. **Method:** This study uses qualitative research using descriptive methods through an inductive approach. The data collection techniques used in the study were Observation, Interview, and Documentation. In determining informants using Snowball sampling and Purpose sampling techniques and when analyzing data using data collection, the analysis is based on George Edward III Theory and PUPR Ministerial Regulation Number 07 of 2018 concerning Self-Help Housing Stimulant Assistance, data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The results in this study indicate that the implementation of the Sawadaya Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in Dobut Village by the West Papua Province Housing Provision Work Unit has not gone well. **Conclusion:** Due to constraints such as weather that does not support the development process, limitations in the availability of building materials, lack of community self-help and uneven distribution of programs. Efforts made by the PP Satker in optimizing the implementation of the BSPS program are to use tarpaulin material to anticipate rain and prevent damage to building construction. Accompanied by technical guidance to TFL in handling bad weather, survey suppliers of building material supply shops, and conduct meetings and guidance on Mapping and Update (refinement) the Database of RTLH and Prospective Assistance Recipients.

Keywords: Policy, Implementation, Self-help Housing Stimulant Assistance Program, Livable Houses

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kampung Dobut merupakan salah satu kampung yang terletak di Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat yang memiliki jumlah rumah tidak layak huni terbilang besar. Besarnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kampung Dobut memperlihatkan bahwa masih terjadi kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog). Dengan adanya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat menjadikan rumah layak huni membuktikan bentuk keseriusan pemerintah dalam rangka untuk membangun/meningkatkan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Kebijakan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pelaksanaan Program tersebut memiliki kendala dan hambatan baik yang ada pada pemerintah dan masyarakat itu sendiri. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), faktor-faktor yang mempengaruhi, serta menganalisis upaya-upaya yang harus dilakukan guna mengatasi faktor penghambat dari kebijakan program tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dalam menentukan informan menggunakan teknik *Snowball sampling* dan *Purposive sampling* dan saat menganalisis data menggunakan pengumpulan data, analisis berdasarkan Teori George Edward III dan Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Sawadaya (BSPS) di Kampung Dobut oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat belum berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** Karena adanya kendala-kendala seperti cuaca yang kurang mendukung proses pembangunan, keterbatasan dalam ketersediaan bahan bangunan, kurangnya swadaya masyarakat dan belum meratanya pemberian program. Upaya yang dilakukan Satker PP dalam mengoptimalkan pelaksanaan program BSPS ini adalah dengan menggunakan material terpal sebagai antisipasi hujan dan pencegahan kerusakan konstruksi bangunan. Disertai bimbingan teknis kepada TFL dalam penanganan cuaca buruk, melakukan survei terhadap suplayer toko penyedia bahan bangunan, serta melakukan rapat dan pembinaan mengenai *Mapping* dan *Update* (penyempurnaan) *Database* RTLH dan Calon Penerima Bantuan.

Kata kunci: Kebijakan, Implementasi, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Rumah Layak Huni

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyediaan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang pangan papan merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Rumah merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat untuk meningkatkan kepuasan pribadi dan pekerjaan, kebanggaan dan harga diri, sebagai penampilan individu dalam upaya dan usaha peningkatan taraf hidup, seperti halnya pengembangan pribadi, karakter dan karakter negara.

Namun sayangnya, dalam pemenuhan kebutuhan primer ini saat ini masih belum puas secara menyeluruh bagi masyarakat. Adapun yang menjadi faktor penyebabnya adalah rendahnya lapangan pekerjaan, terbatasnya keterampilan yang dimiliki sehingga adanya kesenjangan dalam kemampuan masyarakat terhadap daya beli (MBR), terkhusus masyarakat miskin dalam pemenuhan keperluan tempat tinggal yang layak untuk ditempati. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang menjadi syarat dalam mendapatkan bantuan yang dikelompokkan kedalam masyarakat miskin yang memiliki taraf penghasilan rendah bahkan di bawah angka rata-rata pendapatan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar salah satunya adalah rumah layak huni.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perumahan Rakyat dan Permukiman dikaitkan dengan urusan wajib yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mengatur bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia.

Upaya Pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tahun 2018 yaitu tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program bantuan sosial Pemerintah Pusat dibawah lindungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tujuan membantu pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman secara swadaya

bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bersumber pada dana APBN yang kemudian didelegasikan kepada pemerintah Daerah melalui Asas Tugas Pembantuan.

Kabupaten Manokwari merupakan Ibu Kota Provinsi Papua Barat dengan luas wilayah 4.863,40 km² memiliki jumlah penduduk mencapai ±192.123 jiwa yang tersebar di 9 Distrik, 9 Kelurahan dan 151 Kampung (Sumber: BPS Provinsi Papua Barat Tahun 2020). Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, angka Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Manokwari masih sangat tinggi dengan jumlah tertinggi terdapat pada Distrik Manokwari Selatan dengan jumlah mencapai 1.157 unit Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Dalam hal ini, Kampung Dobut merupakan kampung dengan jumlah RTLH tertinggi yaitu sebanyak 240 unit (Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020). Dengan usaha dari pemerintah pada tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengeluarkan kebijakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Manokwari dengan menetapkan Kampung Dobut sebagai lokasi pertama penerima bantuan tersebut. Dalam hal ini Satker PP Provinsi Papua Barat sebagai pelaksana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Dobut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Kampung Dobut berjumlah 50 unit pembangunan yang disebar ke beberapa dusun yaitu Dusun Empeiritbow 13 unit, Dusun Kawanua 20 unit, Dusun Dobngey 12 unit, dan Dusun Kuswor 3 unit. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembagian pembangunan pada tiap-tiap dusun belum ada pemerataan, sehingga hal ini dapat menjadi permasalahan kesenjangan antar dusun pemekaran dalam Kampung Dobut. Dalam hal ini bahwa idealnya suatu pembangunan hunian yang layak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Kemudian, jumlah unit yang diterima masyarakat terbilang sedikit dibandingkan jumlah rumah layak huni yang seharusnya dibutuhkan, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak dapat merasakan hasil dari program BSPS ini yaitu mendapatkan rumah yang layak huni guna mencapai kesejahteraan hidup.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat dilihat bahwa Kampung Dobut memiliki potensi untuk menjadi kampung percontohan bagi seluruh kampung di Kabupaten Manokwari. Namun dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah berupa program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini kurang memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan serta jumlah unit yang diberikan belum cukup dalam menangani banyaknya jumlah rumah tak layak huni di Kampung Dobut

1.3. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya menjadi suatu bahan rekomendasi atau pertimbangan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian. Melakukan review terhadap penelitian sebelumnya sangatlah penting untuk membandingkan masalah atau isu-isu yang diangkat agar dapat dibedakan antara penelitian yang baru dengan yang lama dan dapat memberikan data untuk dikembangkan dalam penelitian baru. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan yaitu:

1. Penelitian dilakukan oleh Ruhnuri Musfiroh pada Tahun 2015 Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa fakultas Fisip dengan judul “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Petir Kabupaten Serang”. Teori Implementasi Kebijakan Publik yang digunakan yaitu Jones (1996). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data Observasi, wawancara dan studi dokumentasi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh M Rara Arizona S pada Tahun 2015 fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Pandeglang Tahun 2012”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraida Mailasari pada Tahun 2016 fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Riau dengan judul “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekanbaru)”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan dalam penggunaan teori antara peneliti dengan ketiga penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik George Edward III (1980), sedangkan peneliti Ruhnuri Musfiroh menggunakan teori Implementasi Jones (1996), peneliti M Rara Arizona menggunakan teori Evaluasi, dan peneliti Nuraida Mailasari menggunakan teori Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruhnuri Musfiroh, dimana dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian kualitatif induktif sedangkan peneliti sendiri menggunakan kualitatif deduktif.

Perbedaan selanjutnya yaitu dalam ketiga penelitian sebelumnya pelaksana kebijakan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini merupakan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sedangkan dalam penelitian ini pelaksana kebijakan merupakan Satuan Kerja Penyediaan Provinsi. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada tingkat keberhasilan program dilihat dari input, proses serta output di Kabupaten, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih menekankan belum terimplementasinya program dengan baik atau tujuan dari program belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan yaitu dapat mengatasi jumlah rumah tak layak huni secara menyeluruh dan merata. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat subjek penelitian ini yang terkait dengan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang diharapkan agar permasalahan dalam pelaksanaan program BSPS dapat diselesaikan untuk membantu pencapaian pelaksanaan di tahun-tahun mendatang dengan tujuan program ini dapat dimanfaatkan secara merata, sempurna, tepat sasaran, serta mensejahterahkan masyarakat dan bermanfaat bagi daerah.

1.5. Tujuan.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kampung Dobut oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kampung Dobut oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat
3. Untuk mengetahui upaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat dalam mengatasi faktor penghambat dari pelaksanaan program Bantuan Stimulan Swadaya di Kampung Dobut..

II. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan keadaan secara realitas saat penelitian, penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan deduktif, karena peneliti bermaksud ingin menggambarkan dan mendeskripsikan serta menganalisis realitas masalah-masalah yang terjadi secara struktur dan sistematis. Selanjutnya pendekatan deduktif merupakan pola pemikiran yang menjelaskan hal yang berbentuk teoritis ke bentuk realitas atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Dalam hal ini peneliti menjelaskan teori-teori menurut ahli, kemudian menjabarkan kenyataan yang terjadi. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan premis yang diberikan.

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan oleh peneliti untuk melihat sejauh mana pemanfaatan dari hasil Implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam bentuk bangunan rumah di Kampung Dobut. Peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur untuk mewawancarai informan peneliti yang dinilai berkaitan dengan Implementasi program BSPS di Kampung Dobut oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat. Dokumen sangat diperlukan dalam pengumpulan data dengan melihat data atau mencatat data dalam bentuk apapun dan dokumen yang tersedia erat kaitannya dengan objek penelitian. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan regulasi program BSPS, mekanisme/juknis program BSPS, Surat Keputusan atau Penetapan Calon Penerima Bantuan (CPB) program BSPS, dan lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan cara mereduksi data, mendisplay data dan menyajikan data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Dobut oleh Satker PP Provinsi Papua Barat mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Salah satu Variabel penting yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik yang merupakan arah kebijakan untuk menghasilkan output dan outcome yang baik adalah implementasi kebijakan. Edward dalam (Winarno, 2008) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi.

3.1 Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Dobut oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat

Komunikasi dalam Implementasi Program BSPS di Kampung Dobut belum berjalan dengan baik. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sudah melaksanakan sosialisasi program dengan baik kepada masyarakat, namun masih ada masyarakat yang apatis dan tidak peduli pada program ini dan belum yakin terhadap perhatian yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian, adanya perubahan-perubahan kebijakan akibat Covid-19, salah satunya adalah pengurangan anggaran bantuan program BSPS. Meski begitu, informasi yang disampaikan dan tersampaikan kepada masyarakat sudah cukup jelas, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan dan tugas mereka dalam program BSPS.

Sumber Daya dari Program BSPS ini adalah dana yang membantu dalam mendanai kebijakan program dan sumber daya manusia. Dimana sumber daya manusia disini adalah tenaga pendamping atau Fasilitator Kelurahan (Faskel) dan Masyarakat sebagai subjek dari program. Sumber daya lain dalam bentuk fasilitas yaitu bahan bangunan merupakan unsur yang juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Kayu yang merupakan sumber daya utama bahan bangunan masih susah didapatkan dan terbatas, sehingga menghambat pekerjaan para tukang bangunan dalam pelaksanaan pembangunan rumah swadaya.

Disposisi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat bertanggungjawab dalam proses pelaksanaan sampai tahap akhir penyelesaian pembangunan. Para aparat pemerintah, baik pada level Desa, Kecamatan, Kabupaten, TFL dan warga masyarakat sendiri sebagai kelompok sasaran adalah mereka yang secara langsung berperan bagi berhasil tidaknya implementasi Program BSPS. Pelaksanaan program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Dobut sangat dirasakan manfaat dan dampak positifnya bagi masyarakat khususnya masyarakat yang memperoleh bantuan tersebut. Dimana dengan adanya program ini memberi suatu suntikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mau dan memampukan diri dalam menciptakan kondisi rumah yang layak baik secara fisik, sosial, ekonomi dan kesehatan.

Struktur Birokrasi pelaksanaan kebijakan program dilihat dan ditentukan oleh SOP dan dari koordinasi antara pihak-pihak yang terkait Bank/Pos Penyalur, TFL, Toko/ Penyedia bahan bangunan dengan masyarakat sebagai subjek dari program yang semuanya telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan program BSPS di Kampung Dobut

Penyiapan masyarakat dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kabupaten dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) kepada masyarakat yang telah diusulkan dan lulus verifikasi untuk mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna memastikan kesiapan masyarakat dalam bentuk kesiapan data-data serta keswadayaan masyarakat

Penetapan calon penerima program BSPS dilakukan melalui pembuatan proposal penerima BSPS dalam bentuk uang yang disahkan tim verifikasi kabupaten untuk diperiksa kembali apakah para penerima program sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang disebut verifikasi dan diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pencairan, penyaluran, dan Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang. Uang dari program BSPS yang diberikan senilai Rp.21.000.000,00; kepada rekening yang dibuat oleh masyarakat dan tidak ditarik dalam bentuk tunai melainkan dimanfaatkan dan langsung dibelanjakan untuk bahan bangunan pembangunan rumah swadaya

Pengadaan dan Penyerahan BSPS dalam bentuk barang merupakan tahap pemanfaatan yaitu pengadaan barang dengan memilih toko/leveransir yang dapat menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan untuk bahan bangunan yang dipilih oleh masyarakat penerima bantuan dan didampingi oleh TFL. Dalam hal ini pengadaan dan penyerahan BSPS dalam bentuk barang belum baik dikarenakan program BSPS di Kampung Dobut ini belum selesai 100% dalam jangka waktu yang diberikan. Hal ini dikarenakan swadaya masyarakat yang masih kurang

Pelaporan yang dilakukan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terkait termasuk masyarakat mengenai pemanfaatan program. Pemanfaatan program

BSPS dalam bentuk rumah sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada masyarakat yang belum menghuni rumah tersebut dikarenakan penyelesaiannya belum tuntas.

3.2 Faktor pendukung

Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Dobut oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat:

1. Komunikasi antar aktor pelaksana dimana para pembuat keputusan sudah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dapat membuat Implementasi program berjalan dengan efektif
2. Kerjasama antar aktor pelaksana dimana Pemerintah Pusat Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah yaitu Satker PP Provinsi Papua Barat bekerjasama dalam mendukung keberhasilan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kampung Dobut
3. Sumber daya terdiri dari sumber daya anggaran yang disini berupa dana bantuan, dan sumber daya manusia yaitu pendamping masyarakat atau Tenaga Fasilitator Lapangan beserta masyarakat itu sendiri guna mendukung pelaksanaan dan implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar berjalan dengan baik.

3.3 Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Dobut oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat:

1. Cuaca yang tidak menentu dan sering hujan mengakibatkan proses pembangunan rumah swadaya menjadi terganggu sehingga membuat pelaksanaan program BSPS tidak dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan
2. Bahan bangunan menjadi penghambat pelaksanaan program BSPS karena ketersediaan bahan kayu yang terbatas dan akses pengambilan yang jauh sehingga program BSPS menjadi lebih lambat
3. Ketepatan sasaran dalam program BSPS sangat penting, dalam Implementasi Program BSPS di Kampung Dobut ini tidak tepat sasaran dalam pemilihan MBR sehingga masyarakat yang tidak memiliki penghasilan juga turut menjadi penerima program

BSPS, yang akhirnya mengakibatkan masyarakat tersebut kesulitan berswadaya dan membuat pelaksanaan program BSPS menjadi lama selesai.

3.4 Upaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat dalam mengatasi faktor penghambat Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Dobut:

1. Menggunakan material terpal sebagai pelindung konstruksi bangunan, melakukan koordinasi dan pembinaan teknis (Bimtek) Kepada Tim Fasilitator Lapangan
2. Melakukan survei pemilihan toko bangunan/penyedia bahan bangun
3. Melakukan rapat dan pembinaan tentang Mapping dan Update (Penyempurnaan) Data Base yang baik terkait Rumah yang Tidak Layak Huni (RTLH) dan Calon Penerima Bantuan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Tingginya angka rumah tak layak huni pada salah satu distrik di Kabupaten Manokwari membuat Kabupaten Manokwari menjadi salah satu prioritas dalam pemberian bantuan swadaya dari Pemerintah. Akan tetapi, sulitnya pelepasan hak tanah yang di karenakan sebagian besar tanah tersebut masih merupakan tanah-tanah adat, mengakibatkan pembangunan di Kabupaten Manokwari sering mengalami penghambatan dan keterlambatan. Hal itulah yang menjadi salah satu penghambat dalam pemberian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Alasan dipilihnya Kampung Dobut menjadi lokasi penerima program BSPS pertama di Kabupaten Manokwari karena memiliki keunggulan dalam masalah kepemilikan tanah yang jelas dibandingkan dengan kampung-kampung lain. Dalam hal ini yaitu kepengurusan kepemilikan tanah yang jelas dan sesuai aturan. Adapun waktu dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Dobut tersebut sudah ditentukan sejak awal yaitu dari bulan Juni tahun 2020 hingga bulan Oktober 2020. Namun setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi pada bulan Januari tahun 2022, masih banyak rumah swadaya hasil dari program BSPS ini yang belum selesai 100%.

Yang dimaksudkan adalah pemerintah sudah memberikan Rp21.000.000,00 dengan tuntas, sisanya adalah dari swadaya masyarakat. Masih banyak masyarakat yang rumahnya belum tuntas karena swadaya belum mencukupi untuk penyelesaian rumah dalam jangka 5 bulan, sehingga pada tahun 2022 sebagian masyarakat belum bisa merasakan manfaat dari

program BSPS yaitu menghuni rumah yang layak. Disisi lain peneliti menyimpulkan bahwa hal ini bukan hanya karena swadaya masyarakat namun memang anggaran bantuan dari pemerintah yaitu Rp21.000.000,00 juta untuk Pembangunan Baru (PB) memang masih sedikit. Mengingat bahwa pada awalnya anggaran PB ini adalah Rp37.000.000,00 juta namun dipangkas karena pandemi Covid-19 dan ini membuat masyarakat sulit berswadaya.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Dobut oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat belum optimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program tersebut belum memenuhi beberapa dimensi dan indikator dari Implementasi Kebijakan menurut George Edward III yaitu: (a) komunikasi (transmisi, kejelasan, dan konsistensi); (b) sumber daya (informasi dan fasilitas); (c) disposisi (arah dan tanggapan). Belum terpenuhinya indikator PERMEN PUPR No.7 Tahun 2018 yaitu pengadaan dan penyerahan BSPS dalam bentuk barang.

Adapun Faktor pendukung Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Dobut oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat yaitu Komunikasi antar aktor pelaksana, kerjasama antar aktor pelaksana, dan Sumber daya yang terdiri dari sumber daya anggaran, dan sumber daya manusia. Faktor Penghambat Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Dobut oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat yaitu Cuaca yang tidak menentu dan sering hujan mengakibatkan proses pembangunan rumah swadaya menjadi terganggu, bahan bangunan yang terbatas, dan tidak tepatnya sasaran dalam pemilihan MBR.

Upaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat dalam mengatasi faktor penghambat Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Dobut yaitu menggunakan material terpal sebagai pelindung konstruksi bangunan, melakukan koordinasi dan pembinaan teknis (Bimtek) kepada Tim Fasilitator Lapangan. Kemudian, melakukan survei pemilihan toko bangunan/penyedia bahan bangunan dan melakukan rapat dan pembinaan tentang Mapping dan Update (Penyempurnaan) Database yang baik terkait Rumah yang Tidak Layak Huni (RTLH) dan Calon Penerima Bantuan.

Saran yang dapat diajukan peneliti dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Dobut oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Cuaca yang menghambat seperti hujan tidak hanya menghambat pekerjaan tetapi menurunkan kualitas bangunan, sebaiknya Satker PP Provinsi Papua Barat mempersiapkan peralatan dan material khusus seperti pemasangan terpal, penyiapan lampu pijar dan blower fan untuk membantu proses pengeringan bagian bangunan agar selalu dalam keadaan kering dan membuat saluran drainase sementara yang dilengkapi pompa air.
2. Satker PP Provinsi Papua Barat dapat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait penggantian bahan konstruksi bangunan berupa kayu menjadi konstruksi besi baja, karena besi baja merupakan substitusi kayu yang

paling menjanjikan. Hal ini dikarenakan bahan baku besi baja lebih murah, kuat dan tahan lama dan mengingat bahan baku kayu semakin terbatas dan sulit didapatkan

3. Satker PP Provinsi Papua Barat agar bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan rekapitulasi terkait pendataan bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Masyarakat yang tidak memiliki penghasilan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur dari program BSPS agar nantinya program BSPS selanjutnya lebih tepat sasaran, baik kepada penerima bantuan maupun lokasi pelaksanaan BSPS.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu waktu dan biaya penelitian. Selain itu dikarenakan program ini sudah dilaksanakan pada tahun 2020 sehingga peneliti tidak dapat ikut menyaksikan proses pelaksanaan program BSPS ini, melainkan peneliti melakukan observasi terhadap bentuk dan hasil penelitian berdasarkan observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara pada Tahun 2022.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti mendapatkan informasi yang bersumber dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat bahwa Program BSPS di Kampung Dobut ini akan dilakukan pelaksanaan program BSPS lanjutan. Dalam hal ini yang sebelumnya jumlah unit BSPS hanya 50 unit, namun ditambah menjadi 35 unit. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan terkait program BSPS di Kampung Dobut, dengan harapan bahwa program lanjutan ini dapat berjalan dengan optimal dari program sebelumnya.



V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media.
- Miles, M.B & Huberman, A, M. (1984). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nugroho dkk. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo.
- Patarai Muhamad Idris. (2020). *Kebijakan Publik Daerah Posisi Dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan (Issue 75)*.
- Sastra, S. dan E. M. (2006). *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Andi Publisher.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Lukman Offset.
- Thoha, M. (2002). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- Vanderstoep, S. . & J. D. . (2009). *Research Methods For Everyday Life “blending and quantitative approaches.”* Jossey-Bass.
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Rajawali Pers.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Med Press.
- Zulfi, S. (2011). *Politik Pembangunan Perumahan Rakyat di Era Reformasi*. HUB.

JURNAL

- Wita Widyandini., 2012. “Hakekat Rumah pada Perencanaan Rumah Susun”, *Jurnal Teodolita* Vol. 13.
- Zulfi Syarif. 2006. *Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah*. USU Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H tentang Hak Asasi Manusia*, 1945.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*, 2011.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*, 2014.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, 2016.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, 2018.

